



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Maret 2018/Periodik - 2017)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN
SUB UNIT KERJA : SUKU DINAS PENDIDIKAN KOTA ADM. JAKARTA BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ETI HERAWATI
2. Jabatan : KEPALA SEKOLAH SD/SDI/SDLB
3. NHK : 223806

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 684.314.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 40 m2/66 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , Rp. 250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 61 m2/115 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 380.314.000
3. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI Rp. 54.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 146.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2008, WARISAN Rp. 5.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2014, WARISAN Rp. 135.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 61.850.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 90.773.276

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 982.937.276

III. HUTANG Rp. 253.690.405

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 729.246.871

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **17 September 2018**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.